

---

ARTICLE

## ANALISIS PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* (STUDI *E-MONEV* BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021)

Agung Saputra<sup>1\*</sup>, Simon Sumanjoyo Hutagalung<sup>2</sup>, Intan Fitri Meutia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia.

How to cite: Saputra, A., Hutagalung, S.S., Meutia, I.F., (2022) Analisis Pengembangan *E-Government* (Studi *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021). *Administrativa* 5 (1)

---

### Article History

Received: 14 April 2022

Accepted: 31 Maret 2023

### Keywords:

*Analysis of E-Government Development, E-Monev South Sumatra,*

### ABSTRACT

*This study aims to find out how the development of the E-Monev system for the Regional Development Planning Agency of South Sumatra Province in 2021 and what are the main factors that influence the development process carried out, based on the successful indicators of E-Government development from the United Nations Online Network in Public Administration and Finance that adjusts the conditions at the Regional Development Planning Agency of South Sumatra Province. The results of the study show that the development of the E-Monev system for the Regional Development Planning Agency of South Sumatra Province in 2021 has been considered successful, where by carrying out this development, it can improve the government management system and development management governance system in the province of South Sumatra, especially the increase in the performance system. more accountability and transparency, as well as the creation of a more effective and efficient development management system. The success of the development of the E-Monev system itself is influenced by various factors, such as the allocation of various resources (human, budget, information, energy, time), the construction of supporting infrastructure and superstructure that supports the performance of the South Sumatra provincial apparatus and the element of political will. the desire of politicians) from the leaders of the South Sumatra Province to make this system a superior system in supporting the process of governance management and development management in South Sumatra Province.*

### ABSTRAK

### Kata Kunci:

*Analisis Pengembangan E-Government, E-Monev Sumatera Selatan,*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan sistem *E-Monev* Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dan apa saja faktor utama yang mempengaruhi proses pengembangan yang dilakukan, dengan berdasarkan pada indikator sukses pengembangan *E-Government* dari *United Nations Online Network in Public Administration and Finance* yang menyesuaikan kondisi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 telah dianggap berhasil, dimana dengan dilakukannya pengembangan ini, dapat memperbaiki sistem tata kelola manajemen pemerintahan dan sistem tata kelola manajemen pembangunan di provinsi Sumatera Selatan terutama terjadinya peningkatan sistem kinerja yang lebih akuntabilitas dan transparan, serta terciptanya sistem manajemen pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Keberhasilan pengembangan sistem *E-Monev* sendiri dipengaruhi dari berbagai faktor, seperti, dialokasikannya berbagai sumber daya (manusia, anggaran, informasi, tenaga, waktu), dibangunnya infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang menunjang kinerja dari perangkat daerah provinsi Sumatera Selatan dan adanya unsur *political will* (keinginan politisi) dari pemimpin Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadikan sistem ini sebagai sistem yang unggul dalam menunjang proses tata kelola manajemen pemerintahan dan tata kelola manajemen pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

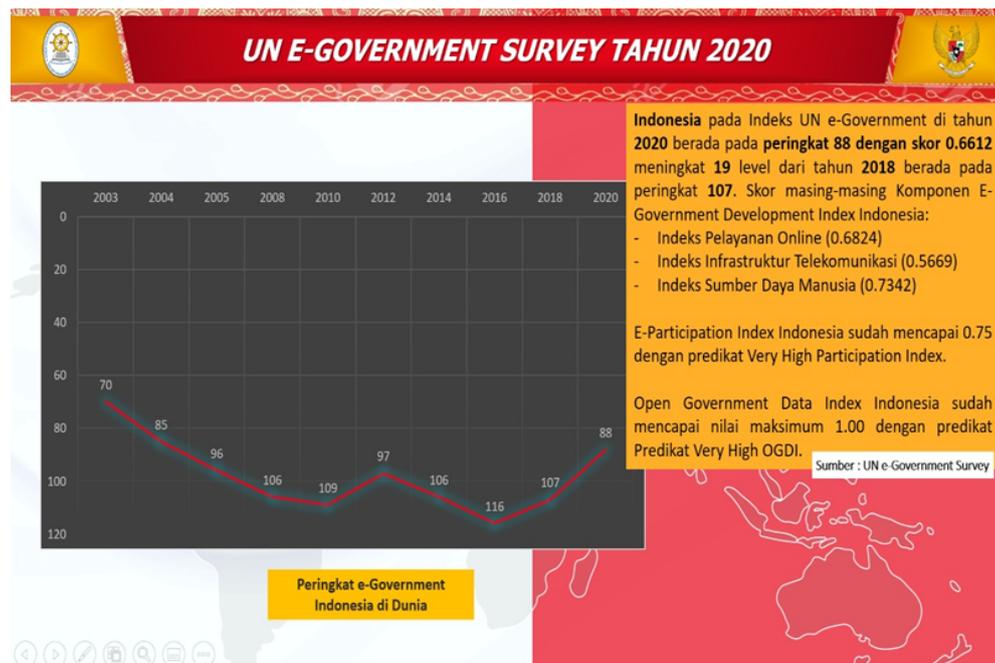
---

## A. PENDAHULUAN

Implementasi pelayanan berbasis elektronik atau pelayanan yang dilakukan secara online yang diterapkan sebagai *electronic government*, merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk berbagai keperluan dan kebutuhan seperti pemberian pelayanan kepada masyarakat, penyediaan informasi mengenai pemerintahan atau seluruh kegiatan yang menyangkut tentang urusan-urusan pemerintahan. Implementasi *electronic government* di seluruh dunia telah membuktikan bahwa *electronic government* menawarkan berbagai manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Salah satu tujuan implementasi *electronic government* adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik (Nugraha, 2018). Menurut Yun dan Opheim menyatakan bahwa *e-government* bertujuan untuk menyediakan platform dimana warga negara terlepas dari status sosial-ekonomi dapat berpartisipasi pada urusan pemerintahan dan administrasi tanpa memandang nilai status seseorang (Bwalya, 2018).

Pelaksanaan *electronic government* di Indonesia dimulai pada tahun 2001 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang “Telekomunikasi, Media dan Informatika (Telematika)”, dalam Instruksi tersebut dijelaskan bahwa aparatur pemerintah diwajibkan terhadap penggunaan dan pemanfaatan sistem telematika dalam mendukung pencapaian pemerintahan yang baik dan mempercepat pelaksanaan demokrasi. Dalam proses pengembangan *electronic government* di Indonesia didasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 menyangkut tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic-Government*.”

Untuk melihat grafik peringkat *Electronic Government* Indonesia sejak tahun 2003 hingga tahun 2020, berikut ini penulis sajikan data yang dikutip dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nation Electronic Government Survey* Tahun 2020 yaitu :



Sumber : Kementerian PANRB Republik Indonesia, 2021. (Diakses pada 17 desember 2021 pukul 12.25)

Dari data tersebut diketahui bahwa, di tahun 2020 kondisi implementasi *e-government* di Indonesia dengan melihat hasil berdasarkan peringkat *E-Government* yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui *United Nations (UN) e-Government Survey 2020* Indonesia mendapatkan peringkat 88 atas pengembangan dan pelaksanaan *e-government*. Hasil pada tahun 2020 yang dipublikasikan di bulan Juli, menunjukkan kenaikan 19 peringkat berbeda dengan tahun 2018 yang mendapatkan peringkat 107 dan peringkat 116 pada tahun 2016. Dalam rilis yang dipublikasikan oleh *Electronic Government Development Index (EGDI) 2020* Indonesia mengalami peningkatan 35 peringkat pada *e-Participation Index* tahun 2020, yang dimana sebelumnya mendapatkan posisi 92 pada tahun 2018, dan menduduki posisi 53 pada tahun 2020 dengan nilai 0.7500. Nilai ini sudah diatas standar dunia dengan skor 0.5677, di atas standar Regional Asia dengan skor 0.6294, dan juga di atas standar Regional Asia Tenggara dengan skor 0.6126. Dari nilai tersebut lah membuat Indonesia naik predikat dari yang sebelumnya termasuk dalam grup *High e-Participation Index* menjadi grup *Very High e-Participation Index*.

Seperti yang diketahui bahwa penerapan *electronic government* tidak hanya dilakukan pada tatanan pemerintah pusat, akan tetapi, penerapan *e-government* juga diimplementasikan pada pemerintah daerah, salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan provinsi di Indonesia yang sudah mengimplementasikan *e-government* pada proses kegiatan pemerintahannya. Khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah menggunakan sistem *electronic government* sejak tahun 2009. Salah satu aplikasi yang dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah aplikasi/sistem *E-Monev*.

Aplikasi sistem *e-Monev* sendiri secara umum dapat dijelaskan sebagai media bagi pemerintah khususnya organisasi perangkat daerah dalam melakukan pelaporan program atau kegiatan tahun berjalan, aplikasi sistem *e-Monev* ini pada awalnya hanya mencakup laporan fisik dan keuangan Perangkat Daerah untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Padahal setiap tahun Bappeda Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan, namun tidak semua Perangkat Daerah melaporkan capaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sesuai format dan tepat waktu. Untuk itu sejak Mei 2016 dilakukan peningkatan cakupan pada sistem *e-Monev* dengan menambah menu laporan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan, di tahun 2021 pengembangan aplikasi *e-Monev* Provinsi Sumatera Selatan telah mencakup pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Dekonsentrasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Urusan Bersama, Tugas Pembantuan Provinsi, Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota, capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Laporan Dana Alokasi Khusus, Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Verifikasi Lapangan hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Tinjauan *E-Government*

*Electronic Government* adalah layanan *Information and Communication Technologies* (ICT) yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah, dalam meningkatkan hubungan dengan masyarakat, swasta dan pemerintah. *Electronic Government* juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah yang saat ini fokus di Indonesia pada implementasi *Electronic Government* (Utama, 2020). *Electronic Government* sendiri bukanlah sebuah perhelatan tunggal dalam waktu yang singkat melainkan sebuah proses evolusioner jangka panjang dalam mentransformasi pemerintah untuk fokus pada layanan masyarakat. Maka, untuk itulah pentingnya membangun sebuah aplikasi roadmap tingkat tinggi (*desain top-down*) dengan suatu *planning* penetapan secara terperinci yang *bottom-up* (Novita, 2014).

Menurut (Indrajit, 2016), terdapat 4 Tipe Relasi *electronic government* diantaranya *Government to Citizen/G-to-C* (Pemerintah dengan warga), *Government to Business/G-to-B* (Pemerintah dengan swasta), *Government to Government/G-to-G* (Pemerintah dengan pemerintah), *Government-to-Employee/G-to-E* (Pemerintah dengan Pegawai/ASN). Berikut penjelasannya:

1. *Government to Citizen/G-to-C* (Pemerintah dengan warga)  
Tipe G-to-C adalah suatu sistem aplikasi yang bisa dianggap umum, dikarenakan tujuan dari pembangunan dan penggunaan berbagai jenis aplikasi/portofolio teknologi informasi yang dibangun dan dijalankan oleh pemerintah yaitu, bertujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (Rakyat).
2. *Government to Business/G-to-B* (Pemerintah dengan swasta)  
Menurut (Indrajit, 2016) diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan sektor bisnis tidak hanya bertujuan untuk memperlancar jalannya perusahaan, akan tetapi jika dipandang lebih jauh dan mendalam banyak hal yang dapat diambil keuntungan dari adanya relasi interaksi yang baik dan efektif antara pemerintah dengan kalangan bisnis.
3. *Government to Government/G-to-G* (Pemerintah dengan pemerintah)

Menurut (Indrajit, 2016) Keperluan dalam berinteraksi antara suatu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya di lingkup yang berbau akan diplomasi semata, akan tetapi jika dilihat lebih jauh dan ditelusuri secara mendalam tujuan dari adanya G-to-G adalah untuk mempermudah dan mempererat relasi bersama *entity-entity* negara (masyarakat, industry, perusahaan) untuk melakukan kegiatan yang mempunyai keterikatan akan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya.

#### 4. *Government to Employees/ G-to-E* (Pemerintah dengan Pegawai/ASN)

Menurut (Indrajit, 2016) tipe relasi *G-to-E* digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja di beberapa instansi sebagai pelayan publik. Beberapa jenis sistem yang dapat diciptakan dan digunakan dengan sistem *G-to-E* yaitu. Sistem pengembangan posisi pegawai pemerintah yang selain bertujuan memberikan keyakinan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), pentingnya juga penunjang proses mutasi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.

### **Manajemen Pembangunan**

Manajemen Pembangunan menurut Siagian adalah usaha atau proses perkembangan yang direncanakan dan usaha perubahan yang dilaksanakan bagi suatu negara dan pemerintahan secara sadar mencapai kemajuan pada bidang pembangunan negara (Kato et al., 2021). Sedangkan defenisi manajemen pembangunan menurut Tjokroamidjojo merupakan rangkaian dimana *government* (pemerintah) kepada swasta (administrasi) dalam mencapai pertumbuhan yang ditetapkan menempati kondisi yang dianggap lebih baik dan lebih maju dalam disetiap sektor kehidupan negara (Kato et al., 2021).

### ***E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan (PEPP) secara legal diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39/2006). Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan (PEPP) merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau dengan kata lain Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan (PEPP) merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Untuk itulah sistem *e-Monev* menjadi salah satu instrumen Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan (PEPP) yang diimplementasikan dalam mengumpulkan data dan informasi capaian realisasi (data realisasi) implementasi rencana pembangunan.

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sistem aplikasi *e-Monev* telah diperkenalkan dan dijalankan pada bulan September Tahun 2015. Secara umum implementasi aplikasi *e-Monev* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mempermudah pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pelaporan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian terhadap capaian realisasi capaian fisik, keuangan APBD/APBN maupun indikator RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan mempermudah pelaksanaan evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan yang dimana sistem *E-Monev* sendiri dikelola dan dijalankan oleh Bidang Pengendalian, Evaluasi

dan Perencanaan Strategis (Sub Bidang Pengendalian), dengan tujuan utamanya yaitu, agar laporan hasil pelaksanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai pada format pelaporan yang telah ditetapkan.

### **Indikator Sukses Pengembangan *E-Government***

Menurut UNPAN (*United Nations Online Network in Public Administration and Finance*) terdapat 10 Indikator sukses dalam pengembangan *electronic government* terangkum dalam *World Public Sector Report 2003* pada Box 3 *Guiding Principles For Successful Electronic Government*, diperoleh Indikator-indikator untuk keberhasilan pengembangan *Electronic Government* yaitu dengan adanya (Rosady, 2018):

1. Ketersediaan pendanaan. (*availability of initial funding*)

Ketersediaan pendanaan dalam pengembangan *electronic government* menjadi salah satu faktor utama dalam proses keberhasilan pengembangan *electronic government*, di Indonesia sendiri pendanaan dalam pengembangan *electronic government* mengarah kepada Inpres no 3 tahun 2003 pada lampiran keempat tentang Konsep Kebijakan Anggaran Pengembangan *Electronic Government*.

2. Keahlian dan budaya dari pelayanan masyarakat. (*skills and culture of the civil services*)

Keahlian dan budaya dari pelayanan masyarakat yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang dalam hal ini aparatur pemerintah, menduduki peringkat pertama dalam kerangka konsep Suprastruktur. Untuk itu pentingnya kompetensi dari para pegawai yang dimiliki oleh suatu lembaga pemerintahan agar dalam proses pengembangan dan pelaksanaan kinerja dapat dilakukan dengan maksimal memberdayakan sumber daya yang ada.

3. Koordinasi. (*co-ordination*)

Koordinasi merupakan usaha dalam mempersatukan semua sumber daya sistem informasi yang dimiliki oleh setiap instansi, kantor, dan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah pada satu kerangka sistem informasi yang terpusat dan menyeluruh. Dengan adanya koordinasi diharapkan pelaksanaan pengembangan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

4. Kerangka hukum. (*legal framework*)

Agar dapat mempunyai legitimasi sebagai landasan hukum, untuk itu perencanaan konsep Pengembangan infrastruktur sebuah Sistem Informasi suatu badan/Lembaga harus berlandaskan hukum yang terkait dan jelas sumber hukum yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi maupun sistem disuatu Lembaga pemerintahan.

5. Infrastruktur informasi teknologi. (*ICT Infrastructure*)

Infrastruktur informasi teknologi diperlukan dalam perkembangan suatu sistem terutama dalam konteks membangun sebuah sistem yang memiliki jaringan yang luas agar dapat memenuhi tuntutan dari kinerja pemerintahan, untuk itulah perlunya pembangunan infrastruktur teknologi agar dapat memperlancar proses kinerja dari para pegawai di suatu

Lembaga pemerintahan dan untuk memperlancar proses transaksi antar pemerintah dengan masyarakat.

6. Kepemimpinan dan komitmen politis jangka eknik . (*political leaderships and long-term political commitment*).

Kepemimpinan dan komitmen politisi jangka Panjang adalah salah satu faktor yang mempunyai peranan krusial terhadap suatu program pengembangan sebuah sistem atau aplikasi *electronic government* disuatu Lembaga nasional maupun lembaga daerah disuatu lingkup politik kekuasaan diwilayah tertentu. Pentingnya komitmen dari pemimpin juga berpengaruh terhadap penggunaan dan pemanfaatan sistem yang ada di suatu lingkup politik tertentu, untuk itulah kepemimpinan juga secara langsung memiliki keterkaitan dengan keberhasilan pengembangan.

7. Kesepakatan Publik. (*public engagement*)

Landasan dari kesepakatan publik yang dimaksud ialah berawal dari kebutuhan publik terhadap informasi yang terbuka, maka adanya keinginan dari pemerintah untuk membenahi sistem informasi nasional yang ada agar proses pelaksanaan pemerintahan memiliki kepercayaan yang lebih luas kepada masyarakat dengan ditunjangnya oleh sebuah sistem yang ada.

8. Perencanaan untuk pengembangan SDM dan infrastruktur teknis. (*plans for development of human capital and technical infrastructure*)

Perencanaan pengembangan Sumber Daya Manusia dimaksudkan adalah untuk menguatkan kemampuan dari tenaga ahli yang tersedia, seperti dilakukannya pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan dari sistem *E-Monev*, sedangkan infrastruktur teknis ialah fasilitas yang mendukung dan tersedia (kapasitas) seperti kualitas kecepatan internet, ketersediaan komputer dan sebagainya.

9. Monitoring dan evaluasi program *Electronic Government*. (*montoring and evaluation*)

Monitoring dan evaluasi program *electronic government* digunakan dalam melihat perkembangan dan arah transformasi dari pengembangan sistem yang akan dilakukan sesuai dengan pengembangan aplikasi maupun sistem yang akan dibangun.

10. Privasi dan keamanan dari transaksi. (*privacy and security*)

Privasi dan keamanan dari transaksi yang dimaksud ialah bagaimana sebuah sistem yang digunakan dan diterapkan oleh pemerintah dapat menjamin keamanan data.

### **C. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan alasan ingin menjabarkan atau mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan metode wawancara dan observasi, yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis bagaimana pengembangan sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dan apa saja faktor pendukung maupun faktor penghambat dari

pengembangan sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

Informan penelitian telah ditetapkan sebelumnya dengan didasarkan pada fokus penelitian, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dengan tepat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 1). Wawancara, 2). Observasi, 3). Dokumentasi. Dan teknik analisis data menggunakan 1). Reduksi data, 2). Penyajian data, 3). Penarikan Kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

1. Ketersediaan pendanaan (*availability of initial funding*)  
Berdasarkan pada hasil penelitian yang didapatkan bahwa, secara teknis anggaran untuk pengembangan sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021, dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000.00 dengan sumber anggaran berasal dari APBD sumatera selatan, dan secara tugas maupun fungsi dari sistem *E-Monev* yang berkaitan dengan anggaran diketahui bahwa sistem ini memiliki peranan yang penting dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dari program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dengan melihat data capaian-capaian realisasi program/kegiatan dari perangkat daerah, dan pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan.
2. Keahlian dan budaya dari pelayanan masyarakat. (*skills and culture of the civil services*)  
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa tidak tersedianya sumber daya manusia yang dalam hal ini pegawai yang memiliki kompetensi di bidang ilmu telekomunikasi (IT), sehingga dalam pengembangan yang dilakukan setiap tahunnya itu didampingi oleh pihak ketiga atau pihak penyedia jasa pengembangan.
3. Koordinasi (*Co-ordination*)  
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa untuk koordinasi yang berkaitan dengan pengembangan sistem *E-Monev* dilakukan dengan Bersama perangkat daerah provinsi sumatera selatan yang membahas mengenai kebutuhan apa saja yang perlu dipenuhi untuk kegiatan proses tata kelola manajemen pembangunan di sumatera selatan, dan selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan koordinasi Bersama pihak pengembang tentang *update* yang akan dilaksanakan pada sistem *E-Monev*.  
Untuk koordinasi yang berkaitan dengan tata kelola manajemen pembangunan dan tata kelola manajemen pemerintahan di Sumatera Selatan dilakukan dalam rangka perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi dari program/kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten/kota di sumatera Selatan.
4. Kerangka Hukum (*legal framework*)  
Mengenai landasan hukum diketahui bahwa landasan hukum yang digunakan dalam pelaporan maupun dalam pengembangan sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2021 sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sebagai legalitas dari tindakan yang dilakukan untuk pengembangan dan *update* yang dilakukan pada sistem *E-Monev*, Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dari pengembangan sistem *E-Monev* tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- a. Permendagri no 86 Tahun 2017 tentang “tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah”.
  - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
5. **Infrastruktur Informasi Teknologi (ICT infrastucture)**  
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pengembangan yang dilakukan pada sistem *E-Monev* tahun 2021 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan menambah menu atau update sistem, yang pertama dengan melakukan penambahan menu “Laporan Evaluasi Renja”. Laporan evaluasi renja sendiri secara umum berfungsi sebagai menu untuk pelaporan capaian kinerja dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan setiap triwulannya, Sedangkan untuk pengembangan dan update yang kedua dilakukan dengan penambahan menu “Verifikasi Hasil Lapangan”. Mengingat belum adanya menu verifikasi lapangan terhadap laporan capaian kinerja dari APBD Belanja Langsung Sumatera Selatan.
6. **Kepemimpinan dan Komitmen Politisi Jangka Panjang (*political leaderships and long-term political commitment*)**  
Berdasarkan pada hasil penelitian berdasarkan tugas dan fungsi dari *E-Monev*, sistem ini memiliki peranan yang penting khususnya dalam memberikan dukungan pencapaian Visi dan Misi dari Pemerintah Sumatera Selatan saat ini, peranan *E-Monev* tidak hanya sebagai media yang digunakan dalam manajemen pembangunan saja seperti pelaporan, evaluasi dan pengendalian atau monitoring pembangunan setiap triwulannya, akan tetapi sistem *E-Monev* ini juga berperan dan berfungsi sebagai media analisis data dalam mewujudkan pembangunan yang inovatif, bermanfaat bagi masyarakat luas dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, untuk melihat sejauh mana sistem ini mendukung pencapaian Visi dan Misi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, inovatif dan pembangunan yang berkelanjutan.
7. **Kesepakatan Publik (*public engagement*)**  
Pada era revolusi industri 4.0 sistem *E-Monev* sudah mulai menyesuaikan diri ditengah gencarnya kemajuan teknologi informasi dengan pengembangan yang dilakukan setiap tahunnya terutama pengembangan yang dilakukan pada tahun 2021 ini, seperti yang kita ketahui sistem ini memang masih butuh pengembangan dan update kedepannya, sedangkan untuk transparansi sendiri *E-Monev* ini merupakan aplikasi yang bersifat *Government to Government* yang dimana tujuan utama dari pembangunan dan pengembangan yang dilakukan adalah untuk mempermudah kinerja dari pemerintah yang ruang lingkupnyapun terbatas tidak terlalu luas dan tidak bersifat sistem yang diciptakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8. **Perencanaan Untuk Pengembangan SDM dan Infrastruktur Teknis (*plans for development of human capital and technical infrastructure*)**

Berdasarkan pada hasil penelitian didapatkan bahwa bahwa sosialisasi yang berkaitan dengan sistem *E-Monev* untuk tahun 2021 sendiri sudah dilakukan sebanyak 4 kali, yang dimana rapat tersebut dilaksanakan pada awal triwulan realisasi pembangunan. Sosialisasi dan rapat koordinasi sendiri seperti yang kita ketahui memiliki peranan penting dalam mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia yang ahli dalam penggunaan sistem *E-Monev* terutama kepada stakeholder dari sistem ini, untuk kapasitas infrastruktur teknis sendiri sudah tersedia dengan baik dikarenakan hal ini didukung dengan adanya anggaran khusus untuk administrasi kantor sendiri, untuk kapasitas komputer dan laptop sendiri secara keseluruhan di Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis memiliki 25 Laptop dan Komputer, 4 alat print, 2 ruangan rapat jaringan internet yang memadai dan infrastruktur teknis lainnya.

9. Monitoring dan Evaluasi Program *Electronic Government (monitoring and evaluation)*.  
Berdasarkan pada hasil penelitian didapatkan bahwa proses monitoring dan evaluasi dari sistem *E-Monev* dilakukan secara berkala setiap tahunnya, hal ini dilakukan untuk menjaga sistem ini agar dapat berjalan terus secara optimal tindakan ini dilakukan sebagai bentuk perawatan dan pemeliharaan sistem oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan untuk evaluasi sendiri meliputi 2 kajian untuk *E-Monev*, yang pertama evaluasi secara teknis yang mengarah kepada sistem dan evaluasi non-teknis yang mengarah kepada kepuasan dari penggunaan, pemenuhan kebutuhan dalam kerangka kinerja yang dilakukan, kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pelaporan dengan menggunakan sistem *E-Monev* akan di evaluasi secara berkala baik di internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sendiri maupun dengan pihak-pihak terkait, seperti pihak pengembang dan pengguna dari sistem *E-Monev*.

10. Privasi dan Keamanan Dari Transaksi (*privacy and security*)

Berdasarkan pada hasil penelitian didapatkan bahwa mengenai privasi dan keamanan data yang ada pada sistem *E-Monev* didapatkan hasil bahwa untuk secara teknis sudah berjalan dengan baik, salah satunya dengan membuat *username* dan *password* untuk dapat mengakses kedalam sistem *E-Monev* dan hingga saat ini belum adanya kasus yang berkaitan dengan kebocoran data maupun kasus peretasan situs dari kejahatan online terhadap sistem *E-Monev*, untuk itulah para pengguna dari sistem ini memiliki kepercayaan penuh dalam mengakses, menggunakan dan memanfaatkan sistem ini untuk proses transaksi antar pemerintah.

Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, berikut ini hasil penelitian dan temuan yang didapat oleh peneliti, diantaranya:

1. Faktor Pendukung
  - a. Kapasitas anggaran yang cukup untuk pengembangan dan perawatan sistem *E-Monev* tahun 2021.
  - b. Adanya keinginan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Sumatera Selatan untuk mengembangkan sistem *E-Monev*.
  - c. Adanya tuntutan untuk mengikuti arah kemajuan zaman dengan menjadikan inovasi aplikasi sebagai instrumen utama.
  - d. Terciptanya Kerjasama yang baik yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, dengan pemerintah Kabupaten/Kota, dan dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini, Gubernur beserta jajarannya yang memiliki kaitan dan hubungan terhadap sistem *E-Monev*

- serta DPRD provinsi Sumatera Selatan, yang Bersama-sama memberikan ide, dukungan, maupun gagasan untuk kemajuan pengembangan sistem *E-Monev* tahun 2021.
- e. Tersedianya sarana dan fasilitas yang lengkap dan memadai dalam menunjang kinerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Faktor Penghambat
- Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, yang menjadi penghambat dari pengembangan sistem ini adalah dari kendala *non-teknis* dari tidak tersedianya sumber daya yang berkompeten di bidang Ilmu Telekomunikasi (IT) yang dimiliki oleh BAPPEDA Sumatera Selatan sehingga pengembangan sistem *E-Monev* dilakukan oleh pihak ketiga, dan saat ini hubungan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada pihak pengembang tidak berjalan dengan baik, hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya perjanjian diatas kertas dan regulasi yang mengatur kerjasama dengan pihak pengembang, sehingga BAPPEDA Sumatera Selatan tidak memiliki hak sepenuhnya dalam mengatur kebijakan pengembangan kepada pihak penyedia jasa yang dimana dari permasalahan ini secara langsung menghambat proses pengembangan yang dilakukan.

## **Pembahasan**

1. Ketersediaan pendanaan. (*availability of initial funding*)  
Pada hasil penelitian, dapatkan diketahui bahwa realisasi anggaran untuk pengembangan sistem *E-Monev* disetiap tahunnya tidak pernah mengalami hambatan ataupun permasalahan mengenai pembiayaan. Mengenai anggaran, sistem ini sendiri juga mempunyai kaitan erat terhadap perencanaan dan realisasi APBD provinsi Sumatera Selatan pada periode berjalan dan periode yang akan datang, dengan data pada sistem ini pemerintah provinsi Sumatera Selatan secara langsung dapat melakukan monitoring anggaran dengan melihat realisasi capaian program/kegiatan dari perangkat daerah disetiap triwulannya (3 bulan) apakah realisasi pembangunan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan atau terjadi tindakan penyimpangan, seperti yang diketahui bahwa kasus tindakan korupsi dan tindakan penyimpangan lainnya dapat dengan mudah terjadi Ketika dilapangan, untuk itu dengan adanya sistem *E-Monev* ini dapat meminimalisir segala bentuk tindakan penyimpangan anggaran. Dan juga sistem ini dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah provinsi Sumatera Selatan untuk merencanakan dan menetapkan anggaran pembangunan berdasarkan temuan atau fakta yang didapatkan dari realisasi capaian disetiap perangkat daerah yang didapat dari sistem *E-Monev*, artinya, media ini dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam mengambil keputusan maupun tindakan yang berkaitan dengan anggaran.
2. Strategi Keahlian dan budaya dari pelayanan masyarakat. (*skills and culture of the civil services*)  
Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu, tidak tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang Ilmu Telekomunikasi (IT) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Sumber Daya Manusia yang ada saat ini merupakan pegawai yang memiliki kompeten dalam mengelola data pada sistem *E-Monev* saja, padahal setiap tahunnya sistem ini terus dilakukan update/pengembangan, maka, dari kekurangan ini lah Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Sumatera Selatan didampingi oleh pihak ketiga sebagai pihak yang melakukan pengembangan sistem *E-Monev*.

3. Koordinasi (*Co-ordination*)

Berdasarkan pada data penelitian mengenai koordinasi pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan bersama perangkat daerah lainnya yaitu dalam bentuk, a. perencanaan, b. pengendalian/monitoring, dan c. evaluasi, koordinasi ini dilakukan agar pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dapat terealisasi dengan baik untuk mencapai kemajuan di Provinsi Sumatera Selatan melalui program/kegiatan baik yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, sosial, Pendidikan dan lain-lain, dengan tipe koordinasi yang dilakukan yaitu, koordinasi horizontal interrelated (koordinasi antar instansi), sistem koordinasi ini melibatkan perangkat daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, yang dimana kegiatan koordinasi ini sendiri didukung oleh sistem *E-Monev* baik dalam bentuk format pelaporan, indikator-indikator apa saja yang diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan, dan capaian realisasi program/kegiatan yang dilaporkan pada sistem *E-Monev*, maka, untuk itulah data pada sistem ini merupakan data yang nantinya akan digunakan dalam proses koordinasi yang berkaitan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

4. Kerangka Hukum (*legal framework*)

Jika dilihat berdasarkan tugas dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan salah satunya yaitu, dengan melakukan evaluasi Renja dan evaluasi verifikasi hasil dari realisasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun dari pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan pada konteks ini lah yang membuat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan memerlukan sistem penunjang yang dapat menunjang kegiatan tersebut, tentunya dari dibangunnya menu Evaluasi Renja dan Hasil Verifikasi Lapangan, secara langsung memberikan dampak struktural bagi proses manajemen pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, yang semakin bertransformasi kepada kemajuan. Artinya, dengan dilakukannya proses Evaluasi Renja melalui sistem *E-Monev* dapat memberikan dampak positif terhadap proses kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan pembangunan dan manajemen pemerintahan di Sumatera Selatan, salah satu bentuknya yaitu, terselenggaranya lingkungan kerja yang efektif dan efisien terutama dalam mengambil keputusan terhadap perencanaan pembangunan maupun tindakan-tindakan cepat dalam merespon berbagai permasalahan pembangunan di lapangan, dan sudah pastinya hal ini berkaitan dengan Verifikasi Hasil Lapangan yang mempunyai suatu keterkaitan terhadap Evaluasi Renja, yang dengan adanya sistem *E-Monev* ini sistem kinerjanya menjadi lebih sederhana namun tidak melupakan unsur-unsur tata Kelola manajemen pembangunan yang sudah ada.

5. Infrastruktur Informasi Teknologi (*ICT Infrastructure*)

Dengan adanya update menu pada sistem *E-Monev* memberikan dampak yang secara signifikan dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terutama dalam bentuk, akuntabilitas dimana dengan adanya sistem ini harapannya dapat memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam proses pencapaian tujuan dari program/kegiatan yang telah ditetapkan, selanjutnya yaitu, transparansi, berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa transparansi sendiri memiliki kaitan yang erat terhadap

akuntabilitas kinerja dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, semakin meningkat akuntabilitas maka akan diikuti dengan meningkatnya transparansi.

6. Kepemimpinan dan komitmen politis jangka panjang. (*political leaderships and long-term political commitment*)  
Seperti yang diketahui bahwa sistem *E-Monev* sendiri merupakan produk inovasi yang dibangun pada tahun 2015 tepatnya pada masa kepemimpinan Gubernur Alex Noerdin dan masih bertahan hingga saat ini di tahun 2021 dimana untuk sekarang ini Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Herman Deru sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terpilih pada periode 2018-2023, jika dilihat dari Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini lebih mengarah dan merujuk kepada penciptaan inovasi-inovasi baru dalam membangun berbagai infrastruktur dan proses manajemen pemerintahan di Sumatera Selatan
7. Kesepakatan publik. (*public engagement*)  
Diketahui bahwa peranan dari sistem *E-Monev* dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan tersebut ditengah kemajuan zaman saat ini sudah dinilai cukup baik, jika dilihat dari segi sistem dan pengembangan yang telah dilakukan setiap tahunnya yang terus melakukan inovasi dan pemenuhan kebutuhan dari pelaksanaan pengendalian maupun pelaporan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, yang dimana dengan adanya inovasi ini kinerja dari Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta lebih transparan terhadap capaian program/kegiatan pembangunan yang telah direalisasikan, terutama untuk menunjang kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan pengendalian, evaluasi, monitoring dan menghimpun data hasil dari realisasi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya.
8. Perencanaan untuk pengembangan SDM dan infrastruktur teknis. (*plans for development of human capital and technical infrastructure*)  
Berdasarkan pada hasil penelitian secara spesifik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2021 belum adanya program/kegiatan yang dibuat khusus untuk pengembangan Sumber Daya Manusia, baik dari penerimaan pegawai maupun pelatihan pegawai yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, mengingat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah 10 tahun tidak menerima CASN dari tahun 2011 dan hingga saat ini masih belum ada rencana untuk menambah jumlah pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui jalur seleksi CASN, hal ini juga disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan dari Pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan dan aktivitas pemerintahan lebih banyak dilakukan secara online atau Work From Home dan beberapa faktor lainnya. Untuk infrastruktur teknis sendiri ialah yang berkaitan terhadap sarana dan fasilitas yang tersedia (*Hardware*) dalam menunjang kinerja dari para pegawai dan mendukung pengembangan sistem *E-Monev* setiap tahunnya, berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini ditahun 2021 mengenai sarana dan fasilitas yang ada sejauh ini sudah cukup baik, seperti kualitas jaringan internet, komputer maupun fasilitas lainnya, hal ini dikarenakan didorong oleh faktor anggaran yang memang setiap tahunnya seluruh kebutuhan administrasi perkantoran selalu dianggarkan untuk mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang proses dan pelaksanaan kinerja oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Monitoring dan evaluasi program *Electronic Government*. (*monitoring and evaluation*)

Dalam monitoring dan evaluasi sistem secara teknis sendiri sebenarnya tidak terlalu intens dilakukan, untuk proses maintenance website/sistem dilakukan setiap satu kuartal yang dalam artian 3 bulan 1 kali dilakukannya main maintenance website/sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk Monitoring dan Evaluasi program/kegiatan pembangunan dari perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan maupun dari pemerintah Kabupaten/Kota, setelah adanya sistem *E-Monev* ini proses manajemen pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan khususnya yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi pembangunan berdasarkan pada hasil penelitian sudah sudah berjalan dengan efektif dan efisien dimana dalam proses pengumpulan data, melihat proses capaian kinerja, dan proses pengendalian maupun monitoring pembangunan cukup dengan sistem *E-Monev*, tentunya hadirnya sistem ini membawa kiat perubahan yang positif terhadap akuntabilitas kinerja bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

10. Privasi dan keamanan dari transaksi. (*privacy and security*)

Privasi dan keamanan pada sistem *E-Monev* berdasarkan pada hasil penelitian sejauh ini dari awal sistem ini dibangun pada tahun 2015 dan hingga saat ini tahun 2021 belum pernah terjadinya kehilangan data, kebocoran data dan tindakan pencurian data penting dari pemerintah, diketahui bahwa sistem keamanan pada *E-Monev* ini sendiri memiliki 3 keamanan yang diantaranya, *Confidentiality*, merupakan sistem keamanan dimana seluruh data yang tersedia pada sistem *E-Monev* hanya dapat diakses oleh administrator yang dipegang oleh Ibu Yuniartini di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, lalu yang kedua yaitu, sistem keamanan *Integrity*, yang merupakan sistem keamanan dimana seluruh data yang termuat pada didalam sistem *E-Monev*, hanya dapat dirubah dan dihapus oleh administrator dan yang terakhir yaitu, *Availability*, adalah ketersediaan sebuah website untuk diakses Ketika administrator memerlukan data dan informasi yang disimpan dalam sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan untuk Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengembangan Sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 yaitu, diantaranya:

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya keinginan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Sumatera Selatan untuk mengembangkan sistem *E-Monev* menjadi sistem yang unggul yang dapat dijadikan sebagai media/alat utama dalam menunjang proses kegiatan manajemen pembangunan dan pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan
- b. Dialokasikannya sumber daya seperti, anggaran dan fasilitas yang lengkap dalam mendukung kemajuan kinerja dari para pegawai
- c. Terjalannya sistem kerjasama yang baik antar instansi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan ide dan masukan untuk pengembangan sistem *E-Monev*.
- d. Adanya tuntutan untuk mengikuti arah kemajuan zaman dengan menjadikan inovasi aplikasi sebagai instrumen utama.

## 2. Faktor Penghambat

Adanya kelemahan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi khususnya pada bidang kompetensi dari para pegawai yang ada, dimana saat ini di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak tersedianya Sumber Daya Manusia yang ahli dan berkompeten dibidang Ilmu Telekomunikasi (IT), yang membuat pengembangan sistem *E-Monev* setiap tahunnya didampingi oleh pihak ketiga atau pihak penyedia jasa pengembangan aplikasi/sistem. Terkadang pada proses pengembangan yang dilakukan masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, terutama kurangnya komitmen dari pihak pengembang yang secara langsung dapat menghambat pengembangan yang dilakukan.

## E. KESIMPULAN

### Simpulan:

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 telah dianggap berhasil, dengan melihat kondisi setelah adanya pengembangan, yang dimana pengembangan ini berpengaruh baik terhadap meningkatnya akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi kinerja dari Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan sistem tata kelola pembangunan yang baik
2. Dialokasikannya sumber daya (Manusia, *financial*, tenaga, informasi) dan dengan dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung di lingkungan kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi faktor pendukung keberhasilan pengembangan sistem *E-Monev* tahun 2021, dan:
3. Tidak tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidang Ilmu Telekomunikasi (IT) menjadikan faktor penghambat dari pengembangan sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang saat ini masih tergantung dan didampingi oleh pihak ketiga.

### Saran:

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka peneliti memberikan saran :

1. Secara teknis perlunya peningkatan kreativitas pada menu di sistem *E-Monev* agar tidak terlalu terlihat sangat sederhana dan tidak memberikan rasa bosan kepada para pengguna sistem ini.
2. Untuk kedepannya diharapkan sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dapat dikembangkan dengan bekerjasama kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan untuk meminimalisir hambatan dengan pihak pengembang.
3. Untuk kedepannya diharapkan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar dapat melakukan rekrutmen/mutasi pegawai yang memiliki kompetensi di bidang Ilmu Telekomunikasi (IT) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk memenuhi dan menutupi kekosongan dan kekurangan yang ada.
4. Perlunya evaluasi sistem *E-monev* setiap tahunnya mengenai tingkat kepuasan dari para pengguna yaitu dari Organisasi Perangkat Daerah Sumatera Selatan terhadap pelayanan yang diberikan dan keberlanjutan sistem tata kelola manajemen pemerintahan dan tata kelola manajemen pembangunan melalui sistem ini.

## REFERENSI

- Bwalya, Kelvin J. 2018. Decolonisation of e-Government Research and Practice: Exploring Contextual Issues and Opportunities in Africa *Decolonisation of E-Government Research and Practice: Exploring Contextual Issues and Opportunities in Africa*. DurbandVille, South Africa: AOSIS. doi: 10.4102/aosis.2018.bk72.
- Indrajit, Richardus Eko. 2016. *Konsep Dan Strategi Electronic Government*. Yogyakarta.
- Kato, Iskandar et al. 2021. *Manajemen Pembangunan Daerah*. 1st ed. Medan: Yayasan Kita Menlis.
- Rosady, Teddy. 2018. “STANDARISASI PENGEMBANGAN ELECTRONIC GOVERNMENT BERDASARKAN UNPAN (United Nations Online Network in Public Administration and Finance) UNTUK INDONESIA.” *Administratus* 2(2): 135–50.
- Utama, A.A Gde Satia. 2020. “The Implementation of E-Government in Indonesia.” *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)* 9(7): 190–96. doi: 10.20525/ijrbs.v9i7.929.
- Novita, Dien. 2014. “Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government: Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan.” *Eksplora Informatika* 4(1): 43–52. <http://ejournal.stikom-bali.ac.id/index.php/0f410362/article/view/644>.
- Kemenpanrb 2021. *Hasil Survei PBB, E-Government Indonesia Naik Peringkat*. Diakses Pada Tanggal 10 September 2021 Pukul 06.30, di laman: <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/hasil-survei-pbb-e-government-indonesia-naik-peringkat>